

**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SDM
DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Wiwin Aryani¹⁾, Tri Widodo²⁾, Maria Entina Puspita³⁾

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga

E-mail: mariaentina@stieama.ac.id³⁾

Abstract

The research aims to determine the effect of implementing a regional financial accounting system, human resource competency and implementing internal audit on the quality of the Salatiga City regional government's financial reports. The population was 52 financial management employees in the Salatiga City Regional Government and were used as research samples. Explanatory research using data analysis methods, validity test, reliability test, multiple linear regression analysis test, t test, F test and coefficient of determination test. The partial research results show that the Regional Financial Accounting System has a positive and significant influence on the Quality of Salatiga City Regional Government Financial Reports, Human Resources Competency (HR) has a positive and significant influence on the Quality of Salatiga City Regional Government Financial Reports and Internal Audit has a positive and significant influence on the Quality of Salatiga City Regional Government Financial Reports. The Regional Financial Accounting System, Human Resources Competency, Internal Audit simultaneously contribute to the Regional Financial Quality of the Salatiga City Government by 40.6%, while the remaining 59.4% is influenced by other variables not examined in this research, namely the Use of Technology and Systems Internal control.

Keywords : *Regional Financial Accounting System, Human Resources Competency, Internal Audit, Quality of Financial Reports.*

1. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses tata keuangan yang telah mengalami kemajuan sistem keuangan yang lebih modern. Laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diatur dalam (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.). Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar dapat menyediakan informasi yang handalmengenai seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Pelaporan keuangan dikatakan handal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau proses menentukan kebenaran laporan keuangan. Fenomena yang ada dalam sektor publik dimana masyarakat menuntut pemerintah agar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercapai untuk mewujudkan *good governance*.

Laporan keuangan pemerintah wajib memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, n.d.). Laporan keuangan pemerintah kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga wajib memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan mudah dipahami pemerintah daerah memerlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (I. S. Kurniawan, 2019). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh dari sumber daya yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para *stakeholder*. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten akan dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah adanya audit internal. Dengan adanya audit internal diharapkan dapat membantu dan mendorong terciptanya keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui kegiatan *Assurance dan Consultin* (Omasrianto & Arifuddin, 2017).

Penelitian (Launtu, 2021) menunjukkan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya dengan diterapkannya sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang baik terutama dibidang keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga. (Dewi & Putu, 2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, berpengetahuan serta penerapan sistem akuntansi daerah tepat akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Sedangkan (Zumaira & Rahmawaty, 2022b) menunjukkan peran audit internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikarenakan audit internal yang kurang berperan dengan baik dalam pengawasan laporan keuangan yang mengindikasikan masih kurangnya keterbukaan dan transparansi.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Terdapat empat opini yang akan diberikan BPK dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Sepertinya halnya laporan keuangan

permerintah Kota Salatiga pertama kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ditahun 2016.

Di tahun sebelumnya pemerintah Kota Salatiga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disebabkan adanya permasalahan pada pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Dengan adanya opini WTP berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga meningkat, namun masih catatan-catatan yang perlu diperbaiki. keuangan OPD. Sesuai hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode tahun 2016-2023. Hal ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mendasari keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga yang selama 5 kali berturut-turut mulai 2016 sampai 2020 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Maka peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga?
3. Apakah penerapan audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan audit internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga?

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi adalah serangkaian dimulai dari input transaksi keuangan, diproses dalam bentuk analisis transaksi seperti catatan atau jurnal dan output dalam bentuk laporan keuangan (Mulyadi, 2016). Menurut (Aprisyah & Yuliati, 2021) sistem akuntansi merupakan sebuah prosedur yang digunakan dalam menghasilkan informasi yang Sistem akuntansi merupakan suatu metode atau prosedur untuk mencatat dan melaporkan suatu transaksi keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang tepat dan relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar, maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi (Binawati & Nindyaningsih, 2022). Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.) diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.). Sistem akuntansi keuangan daerah di Kota Salatiga menganut (Peraturan Walikota Salatiga No. 37 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga., n.d.) yaitu sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dan menggunakan aplikasi komputer Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik (Purba & Amrul, 2018). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sistem akuntansi keuangan daerah mampu memberikan output data berupa laporan keuangan pemerintah daerah (Pujanira & Taman, 2017).

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah, n.d.) meliputi (1) Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan Laporan Operasional, beban, pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, dan (2) Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan Laporan Operasional, beban, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Sedangkan Prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.) terdiri dari Prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur tetap atau barang milik daerah dan Prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi keuangan daerah ini merupakan salah satu faktor pendorong dalam terwujudnya *Good Government Governance* (Afandi et al., 2023).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah suatu kemampuan atau keahlian yang ada pada diri seseorang melalui pendidikan dan serta kegiatan pelatihan untuk mencapai kinerja maksimal dalam menyelesaikan tugasnya (Fernandes & Rilla, 2022). Kompetensi juga dapat diartikan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Fathi et al., 2022). Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Sulaiman & Nurharjanti, 2022). Untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia menurut (Clark, 2017) adalah suatu ilmu pengetahuan yang menguraikan terkait prosedur pelaksanaan aktivitas kerja secara praktik. Kompetensi sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggung jawabnya (Saraswati & Nyoman, 2019).

Terdapat 5 (lima) indikator kompetensi sumber daya manusia menurut (Wibowo, 2016) yaitu (1) Motif, sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan, (2) Sifat diri, Karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. (3) Konsep diri, nilai-nilai atau citra diri yang dimiliki oleh seseorang (4) Pengetahuan, Informasi yang dimiliki orang dalam bidang tertentu dan (5) Keterampilan, kemampuan mengerjakan tugas fisik, mental tertentu atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. Dalam praktiknya, kompetensi sumber daya manusia juga dapat dilihat dari kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) dalam setiap kemampuan mengerjakan tugas dan berpikir secara analitis dalam setiap tugas yang diberikan (Pramono & Puspita, 2020).

Audit Internal

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola (Zamzami, F. et al., 2018). Selain itu, audit internal merupakan aktivitas penjamin yang independen dan objektif, juga suatu jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi atau institusi (A. Kurniawan, 2015). Audit internal adalah sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, obyektif dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi (Hidayat et al., 2019). Audit internal dapat diartikan sebagai suara cara untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui sebuah aktivitas, pendekatan yang sistematis dan penilaian untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas kinerja suatu organisasi. Auditor internal wajib memberikan laporan hasil penilaian kepada manajemen atau pimpinan perusahaan, berupa penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan yang memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai perusahaan (A. Kurniawan, 2015).

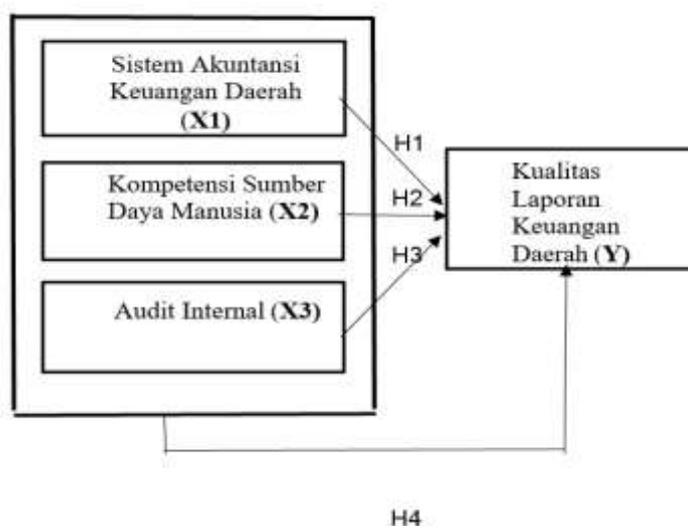
Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi (Zumaira & Rahmawaty, 2022a). Audit internal di Pemerintah Kota Salatiga, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah yang memiliki peran sangat penting sebagai pengawas intern terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kota Salatiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran audit internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kota Salatiga adalah melakukan pengawasan intern terhadap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (N. L. W. T. Lestari & Dewi., 2020). (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, n.d.) menyatakan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki unsur- unsur karakteristik kualitatif laporan

keuangan seperti (1) relevan, informasi yang relevan dari laporan keuangan yaitu memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap sesuai dengan SAP (2) Andal, informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, serta (4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.) menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Audit internal menjadi faktor penting dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan atau *fraud* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sudarmawanti & Mar’ati, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, audit internal terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah seluruh pengelola keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang berjumlah 52 orang dengan rincian 27 orang Bendahara Pengeluaran dan 25 orang petugas akuntansi di masing-masing OPD. Karena jumlah anggota populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka semua anggota populasi penelitian yang berjumlah 52 orang dijadikan sampel penelitian.



Gambar 1.
Gambar Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga
3. Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Salatiga.

Berikut adalah definisi konsep dan definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1.
Definisi Konsep dan Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Konsep	Definisi Operasional
1	Laporan Keuangan Daerah	Karakteristik kualitatif laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, n.d.) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas.	Kualitas Laporan Keuangan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Relevan <ul style="list-style-type: none"> - Standar akuntansi pemerintah - <i>Feedback value</i> - <i>Predictive value</i> - Tepat waktu • Andal <ul style="list-style-type: none"> - Jujur - Dapat diverifikasi - netralitas • Dapat dibandingkan • Dapat dipahami
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., n.d.) Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data • Pencatatan • Pengikhtisaran • Pelaporan
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Irafah, Siti et al., 2020)	Kompetensi Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan • Sikap
4	Audit Internal	Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit meliputi review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka	Audit Internal <ul style="list-style-type: none"> • Review • Evaluasi • Pemantauan • Pengawasan

		memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah., n.d.)	
--	--	--	--

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan responden penelitian pegawai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kota Salatiga berjumlah 52 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan atau pernyataan terkait kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan audit internal dalam OPD masing-masing. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga, gambaran tersebut mengenai hubungan antara variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan audit internal) dengan variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berikut adalah tabel hasil pengujian validitas, reliabilitas dan regresi linier berganda:

Tabel 2.
Uji Validitas

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r- tabel	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)			
Item 1	0,415	0,273	Valid
Item 2	0,486	0,273	Valid
Item 3	0,471	0,273	Valid
Item 4	0,392	0,273	Valid
Item 5	0,643	0,273	Valid
Item 6	0,538	0,273	Valid
Item 7	0,478	0,273	Valid
Item 8	0,590	0,273	Valid
Item 9	0,483	0,273	Valid
Item 10	0,665	0,273	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)			
Item 1	0,301	0,273	Valid
Item 2	0,470	0,273	Valid
Item 3	0,370	0,273	Valid
Item 4	0,569	0,273	Valid
Item 5	0,512	0,273	Valid
Item 6	0,396	0,273	Valid
Item 7	0,425	0,273	Valid
Item 8	0,431	0,273	Valid
Item 9	0,338	0,273	Valid

Audit Internal (X3)			
Item 1	0,327	0,273	Valid
Item 2	0,342	0,273	Valid
Item 3	0,405	0,273	Valid
Item 4	0,465	0,273	Valid
Item 5	0,415	0,273	Valid
Item 6	0,449	0,273	Valid
Item 7	0,471	0,273	Valid

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r- tabel	Keterangan
Item 8	0,565	0,273	Valid

Kualitas Laporan Keuangan (Y)			
Item 1	0,577	0,273	Valid
Item 2	0,662	0,273	Valid
Item 3	0,665	0,273	Valid
Item 4	0,576	0,273	Valid
Item 6	0,604	0,273	Valid
Item 7	0,398	0,273	Valid
Item 8	0,706	0,273	Valid
Item 9	0,587	0,273	Valid
Item 10	0,664	0,273	Valid

Sumber: Olah Data SPSS (2023)

Berdasarkan data pada Tabel diatas, hasil uji validitas instrumen memiliki r hitung lebih besar dari r tabel sehingga item dalam instrumen penelitian ini valid dan dapat digunakan.

Tabel 3.
Hasil Koefisien Uji Reliabilitas

Indikator	Alpha Cronbach	Alpha Cronbach Pembanding	Ket
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,826	0,700	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,718	0,700	Reliabel
Audit Internal	0,733	0,700	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,870	0,700	Reliabel

Sumber :Olah Data SPSS (2023)

Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai dari alpha cronbach masing-masing variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha Cronbach* > 0,700 (Ghozali, 2018). Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwamasing masing variabel memiliki nilai *alpha cronbach* diatas 0,700 yang artinya reliabilitas kuesioner dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Audit Internal dan Kualitas Laporan KeuanganDaerah dinyatakan reliabel dan dapat diterima.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		B	Std. Error			
1	(Constant)	9,030	7,749		1,165	,250
	Sistem_KaDa	,328	,107	,334	3,075	,003
	Komp_SDM	,608	,135	,501	4,512	,000
	Audit_Internal	,493	,132	,414	3,725	,001

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa nilai konstan adalah 9,030 sedangkan nilai Koefisien untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) adalah 0,328, nilai untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) adalah 0,608, untuk variabel Audit Internal (X3) adalah 0,493. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linier berganda

$$Y = 9,030 + 0,328X_1 + 0,608X_2 + 0,493X_3$$

Uji t (t-test)

Uji t (t-test) dimaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara individu baik itu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga, dengan menggunakan kriteria apabila t-hitung > t-tabel maka Hipotesis diterima.

Tabel 5.
Perbandingan Nilai T-hitung dan Nilai T-Tabel

NO	VARIABEL	T-HITUNG	T-TABEL	Sig.
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	3,075	2,01	0,003
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	4,512	2,01	0,000
3	Audit Internal	3,725	2,01	0,001

Sumber : *Olah Data SPSS, 2023*

3.2. Pembahasan

Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan pengolahan pada uji t (t-test) untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, didapatkan hasil bahwa t-hitung variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 3,075 dengan nilai t-tabel adalah 2,01 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Salatiga.

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga, hal ini disebabkan oleh sistem akuntansi keuangan daerah menyajikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga yang lengkap dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dipahami sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi yang berkepentingan.

Hasil uji hipotesis pertama yang menunjukkan terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nilamsari et al., 2020), (Sasmita et al., 2020), (Sari & Desipradani, 2022) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian (Mispa & Nuramal, 2022) yang menyatakan justru tidak ada pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, ada beberapa proses pencatatan transaksi keuangan tidak kronologis sehingga akan mengurangi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem akuntansi keuangan memiliki fungsi untuk mendorong terwujudnya informasi akuntansi yang terstruktur yaitu andal, tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi, dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan menggunakan kebijakan akuntansi sehingga dengan begitu diharapkan akan dapat menjamin penyajian laporan keuangan daerah yang berkualitas dan konsisten.

Uji Hipotesis Kedua

Uji hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan Tabel pengolahan pada uji t (t-test) untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, didapatkan hasil bahwa t-hitung variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 4,512 dengan nilai t-tabel adalah 2,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki kontribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Sasmita et al., 2020), (S. Lestari & Hastuti, 2020) serta (Mispa & Nuramal, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintahan ataupun pada bidang yang lain. Sumber daya manusia menjadi ujung tombak dari upaya untuk pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia bagi suatu organisasi ataupun instansi menjadi modal bagi pergerakan dalam upaya pencapaian tujuan. Kompetensi SDM menjadi penting dan diperlukan agar laporan keuangan daerah dapat disusun dengan sesuai standar dan dengan kualitas yang baik. Keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh kompetensi SDM itu sendiri, karena dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian suatu obyek akan membutuhkan SDM dengan kompetensi yang dimilikinya. Jika kompetensi SDM dapat memenuhi syarat dan dapat berkembang dengan baik maka Kualitas laporan keuangan daerah pun akan mengalami peningkatan sehingga Kualitas laporan keuangan daerah dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Zumaira & Rahmawaty, 2022a) dan (Sari & Desipradani, 2022) justru menyatakan tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pegawai pada bidang pengelolaan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga pegawai tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi pegawai yang bukan berlatar pendidikan akuntansi dimungkinkan dapat meningkat apabila pemerintah daerah melakukan pelatihan secara masif dan berkesinambungan serta senantiasa melakukan pendampingan dalam penyusunan pelaporan keuangan dari suatu instansi. Dengan ketiadaan program peningkatan kompetensi dan pendampingan terhadap pengelola keuangan suatu instansi maka potensi Laporan keuangan yang dihasilkan akan berkurang kualitasnya.

Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan Tabel tentang pengolahan pada uji t (t-test) untuk variabel Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, didapatkan hasil bahwa t-hitung variabel Audit Internal adalah sebesar 3,725 dengan nilai t-tabel adalah 2,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Tujuan Audit Internal yaitu melakukan pengecekan, pemeriksaan, pemantauan dan pengawasan dalam segala hal kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan penyusunan laporan keuangan. Apabila tidak adanya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah maka akan menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan bermutu.

Hasil uji hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari & Desipradani, 2022), (S. Lestari & Hastuti, 2020) dan (Sasmita et al., 2020) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan audit internal terhadap Kualitas laporan keuangan. Keberadaan Audit internal dapat membantu organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui aktivitas, pendekatan yang sistematis dan penilaian untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas kinerja suatu organisasi. Audit internal yang dilakukan dapat memberikan informasi dan umpan balik kepada pemangku kebijakan terkait hasil penilaian yang telah dilakukannya. Audit internal yang dilakukan dapat membantu instansi untuk mengetahui permasalahan pada internal instansi tersebut serta dapat memberikan saran kepada instansi untuk melakukan perbaikan termasuk pada laporan keuangan dari suatu OPD dengan adanya masukan dan saran dari hasil audit internal akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dari OPD tersebut.

Auditor internal dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Auditor internal dapat memberikan saran terkait proses pencatatan transaksi, pengukuran aset serta pengungkapan informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan. Auditor sebagai pelaksana Audit internal dapat memberikan jaminan terhadap keandalan laporan keuangan suatu instansi. Auditor internal dapat membantu instansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat, lengkap dan dapat dipercaya oleh para stakeholder.

Hasil penelitian ini juga menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zumaira & Rahmawaty, 2022a) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Auditor sebagai pelaksana audit internal memegang peran penting, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus dengan penuh tanggung jawab dengan memegang nilai transparansi. Audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan audit secara internal auditor

tidak melakukan tugasnya dengan baik seperti tidak melaporkan hasil temuan kepada atasan, dengan dilaksanakan audit internal yang tidak menyeluruh, kurang transparan dan keterbukaan akan berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Uji Hipotesis Keempat

Uji hipotesis keempat menggunakan Uji F (F-test) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal secara simultan atau bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga. Hasil pengujian Uji F dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.
Hasil Uji Anova^b

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156,405	3	52,135	12,632	,000 ^b
	Residual	198,114	48	4,127		
	Total	354,519	51			

a. Dependent Variable: Kual_Lap_Keuangan

b. Predictors: (Constant), Audit_Internal, Sistem_KaDa, Komp_SDM

Sumber : Hasil Olah SPSS (2023)

Pengujian secara simultan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal, terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah hasil dimana nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal secara simultan atau secara bersama sama mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

Berdasarkan hasil uji tersebut diatas, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dapat diterima. Dengan adanya penggunaan Sistem Akuntansi Daerah yang tepat, Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berpendidikan dibidang keuangan, Audit Internal dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan yang akan memberikan kualitas yang baik pada laporan keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Hasil perhitungan data untuk uji Koefisien Determinasi dapat diketahui sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,664 ^a	,441	,406	2,03159

Predictors: (Constant), Audit_In, Sistem_KaDa, Komp_SDM

Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* pada Tabel diatas yaitu sebesar 0,406 sehingga nilai Koefisien Determinasi adalah yang dilihat dari besaran nilai *Adjusted R Square* yaitu 40,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Audit Internal secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap Kualitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga sebesar 40,6%, sedangkan sisanya 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Internal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan audit internal **berpengaruh signifikan** terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
2. Secara simultan ketiga variabel independen tersebut juga **berpengaruh signifikan** terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
3. Besar nilai koefisien determinasi sebesar 0,406 yang artinya kontribusi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga adalah sebesar 40,6%. Sedangkan sisanya 59,4 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Internal.

Saran Penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**, sistem merupakan suatu rangkaian mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban atau pelaporan. Dalam sistem perlu adanya suatu instrumen untuk mempermudah pelaksanaan akuntansi keuangan daerah. Instrumen berupa aplikasi sudah ada, akan tetapi perlu adanya kemudahan dalam penggunaan sampai dengan pelaporannya. Akan sangat memudahkan apabila sistem akuntansi keuangan daerah dengan berbasis aplikasi ini dapat tersinkronisasi dengan seluruh OPD sehingga pemerintah daerah menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan.
2. Pada **Kompetensi Sumber Daya Manusia**, dalam menjalankan keuangan pemerintah memerlukan pelaksana atau pegawai yang kompeten. Dengan pegawai yang kompeten pada bidang keuangan sampai dengan pelaporan maka akan memudahkan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporannya. Oleh karena itu sangat bijaksana apabila pimpinan daerah menempatkan personil dengan latar belakang pendidikan (minimal sarjana ekonomi atau akuntansi) di setiap OPD, hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses berjalannya keseluruhan dari keuangan daerah sampai pada tahap pelaporan.
3. Pada **Audit Internal**, audit internal dimaksudkan untuk membantu masing masing OPD dalam melaksanakan tanggung jawab pada laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing masing OPD. Audit internal seharusnya dilakukan secara berjangka untuk menghindari permasalahan yang mungkin dapat timbul. Dalam melakukan audit internal ini diperlukan personil yang obyektif, mengikuti prosedur dan dapat memberikan masukan yang dapat membantu pengelola keuangan dari masing masing OPD, serta
4. Pada **Kualitas Laporan Keuangan Daerah**, laporan keuangan daerah perlu disusun dengan mengikuti norma atau acuan dari pemerintah pusat. Laporan keuangan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan keuangan di suatu daerah, maka dari itu diperlukan laporan keuangan daerah yang berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik kepada pemerintah pusat ataupun juga kepada masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil topik terkait keuangan daerah, dapat melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif sehingga dapat ditemukan masalah ataupun fenomena yang aktual serta faktual dalam berjalannya roda keuangan di suatu pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P., Puspita, M. E., Wibowo, M. A., Kusumaningrum, D., & Santoso, A. (2023). The Effect of Good Government Governance on Developing Village Index (IDM) Through Sustainable Development Goals (SDGS) Empirical Study In Kedungjati District, Grobogan Regency. *Journal of Economics Dan Public Health.*, 2(3), 75–82.
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *JIMEA - Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat). *Jurnal OPTIMAL*, 19(1 Maret 2022), 19–39.
- Clark, J. M. (2017). *Human Resource Management*. International Edition. Boston: The McGraw-Hill Companies. Inc.
- Dewi, G. A. K., & Putu, E. D. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dan sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1 Juni).
- Fathi, A., Parela, E., & Trisnowati, J. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus: Inspektorat Provinsi Lampung)”. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Ke-II.*, II(22-23 Oktober 2022).
- Fernandes, J., & Rilla, Y. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Instansi Pemerintahan Kota Padang. *Jurnal Pundi.*, 6(1-Mei 2022).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R., Ruslan, M., & Thanwain. (2019). Peran Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Karya Dharma Di Kabupaten Majene”. *Economics Bosowa Journal Edisi xxx April s/d Vol 5, No. 002. Economics Bosowa Journal Edisi III April*, 5(002).

- Irafah, Siti, Sari, E. N., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan.*, 8(2), 337–348.
- Kurniawan, A. (2015). *Audit Internal*. BPFE. Yogyakarta.
- Kurniawan, I. S. (2019). Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *Kinerja*, 16(2), 160–165.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Goa. *Akmen*, 18(1), 14–44.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi., N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2-Januari), 170–178.
- Lestari, S., & Hastuti. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 26-27 Agustus.
- Mispa, S., & Nuramal. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *YUME : Journal of Management ISSN : 2614-851X*, 5, 256–266.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nilamsari, Y., Fatmasari, Alwiyah, A., & Wibowo, E. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 85–94.
- Omasrianto, H., & Arifuddin, M. (2017). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan, audit internal dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Universitas Halu Oleo. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 2(1), Februari 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Salatiga No. 37 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.
- Pramono, J., & Puspita, M. E. (2020). Pengaruh Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam menentukan risiko kecurangan. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 2(1), 81–88.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 6(2), 14–28.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Saraswati, I. G. A. G., & Nyoman, I. G. A. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3-Juni 2019).
- Sari, K., & Desipradani, G. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. *Jurnal Sustainable*, 2(2-Mei).
- Sasmita, Dewi, A. N., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing.*, 15(2-Oktober).
- Sudarmawanti, E., & Mar'ati, F. S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Akuntansi Indonesia.*, 11(1), 14–25.
- Sulaiman, R. L., & Nurharjanti, N. N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Inter dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara). *Jurnal Snistek*, 4(Januari 2022), ISBN 978-623-56451-0.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Template Jurnal Edunomika

Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2018). *Audit Internal konsep dan Praktik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Zumaira, T., & Rahmawaty. (2022a). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran auditor internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada skpk banda aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(4-November), 507–518.

Zumaira, T., & Rahmawaty. (2022b). *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peran auditor internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPK Banda Aceh)*.